

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas hasil wawancara dan dokumentasi pada Bab sebelumnya, simpulan yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Penyebab Provinsi Jawa Barat belum menerbitkan obligasi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

Hasil analisis dimensi-dimensi dari aspek obligasi daerah (Djaenuri, 2012) dan kesuksesan obligasi daerah (Hardwood, 2000) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa:

- a. Landasan hukum dan prosedur pengelolaan

Regulasi pusat yang menjadi landasan hukum penerbitan obligasi daerah sebagian telah ditetapkan yaitu UU 1/2022 HKPD, PP 1/2024 HKFN, dan POJK 10/2024. Adapun PMK sebagai tindak lanjut PP 1/2024 HKFN belum ditetapkan dan menjadi penghambat dalam penerbitan obligasi daerah. Selanjutnya regulasi daerah berupa dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD Tahun 2018-2023, RPD Tahun 2024-2026, RKPD Tahun 2024, dan RKPD Tahun 2025 telah mengakomodir substansi obligasi daerah. Sedangkan Perda APBD, Perkada Penerbitan Obligasi Daerah, dan Perda Pembentukan Dana Cadangan Obligasi Daerah masih berproses.

Selanjutnya, prosedur pengelolaan berupa strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah tengah berproses. Adapun portofolio pembiayaan utang daerah yang dimiliki adalah Pinjaman PEN. Terakhir mengingat, proses penerbitan masih dalam tahapan persiapan penerbitan, maka prosedur pengelolaan berupa penerbitan, penjualan, pembelian kembali, pelunasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban obligasi daerah belum menjadi faktor penghambat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan obligasi daerah.

b. Lembaga-lembaga yang diperlukan

Penunjukan lembaga-lembaga yang diperlukan seperti lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, dan *Self Regulatory Organization*) bukan menjadi faktor penghambat dalam penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun terkait biaya penerbitan obligasi juga relatif tidak menjadi penghambat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan obligasi daerah.

c. Persyaratan penerbitan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi persyaratan penerbitan berupa opini BPK atas LKPD terakhir, batas maksimal pembiayaan utang daerah, rasio DSCR, dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah. Pada penentuan proyek terdapat kendala dalam pemenuhan readiness criteria sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya DMU yang dibentuk belum memenuhi ketentuan dan belum mencakup keseluruhan tugas khususnya pengelolaan dan pasar modal.

Proses penerbitan masih dalam tahap persiapan penerbitan sehingga persyaratan berupa persetujuan DPRD, pertimbangan Menteri Dalam Negeri, persetujuan kepada Menteri, serta pernyataan pendaftaran OJK belum diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pada dimensi persyaratan penerbitan hambatan yang ditemukan adalah penentuan proyek dan kesiapan DMU.

d. Faktor risiko

Faktor risiko yaitu risiko kredit, risiko harga, risiko alam, risiko konstruksi, dan risiko inflasi tidak menjadi penghambat dalam penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Barat.

e. Partisipasi pasar

Adanya partisipasi pasar dari emiten (pemerintah daerah), investor, maupun lembaga-lembaga yang diperlukan sehingga partisipasi pasar

tidak menjadi penghambat dalam penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Barat.

f. Komitmen pemerintah

Pemerintah pusat memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada level daerah, terdapat komitmen DPRD dan perangkat daerah dalam penerbitan obligasi daerah. Adapun, komitmen kepala daerah terkendala pandangan terkait risiko dan beban keuangan atas obligasi daerah di masa datang sehingga menyerahkan keputusan terkait kelanjutan proses penerbitan kepada kepala daerah definitif. Dengan demikian pada dimensi komitmen pemerintah, hambatan yang ditemukan adalah komitmen kepala daerah.

g. Stabilitas dan kredibilitas makro ekonomi

Kondisi makro ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi, rasio simpanan masyarakat, rasio defisit APBD, inflasi, serta tingkat suku bunga tidak menjadi faktor penghambat dalam penerbitan obligasi daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, meskipun kondisi politik khususnya masa jabatan kepala daerah berpengaruh namun secara regulasi telah dimungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah. Dengan demikian stabilitas dan kredibilitas makro ekonomi tidak menghambat penerbitan obligasi daerah.

h. Perpajakan

Perpajakan tidak menghambat penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat, namun opsi memberikan insentif berupa pembebasan pajak layak untuk dilakukan.

Selanjutnya dengan menggunakan metode USG, hambatan-hambatan yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerbitkan obligasi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah telah diberikan prioritas sebagai berikut:

- a. Prioritas I: komitmen pemerintah berupa komitmen kepala daerah.

Kurangnya komitmen kepala daerah dalam melanjutkan proses penerbitan obligasi daerah dalam masa jabatannya didorong oleh kekhawatiran akan beban keuangan di masa mendatang.

- b. Prioritas II: persyaratan penerbitan berupa penentuan proyek dan kesiapan DMU

Proses penentuan proyek memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar enam belas bulan atau sejak bulan Desember 2023 hingga Mei 2024. Lama waktu tersebut disebabkan oleh adanya penggantian proyek potensial yang akan dibiayai dari obligasi daerah, khususnya atas proyek yang tidak dapat memenuhi *readiness criteria*. Adapun kesiapan DMU menjadi hambatan mengingat bentuk DMU belum memenuhi ketentuan (PP HKFN) dan lingkup penugasan DMU belum mengakomodir tugas pengelolaan dan tugas pasar modal.

- c. Prioritas III: landasan hukum dan prosedur pengelolaan berupa belum ditetapkannya PMK

Belum ditetapkannya PMK sebagai amanat PP HKFN menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses penerbitan obligasi daerah. Hal ini mengingat ketentuan mengenai tata cara penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah akan diatur secara rinci dalam PMK.

2. Rumusan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan obligasi daerah.

Dengan menggunakan konsep strategi *Ends, Ways, Means* (Lykke, 1989), strategi yang dirumuskan dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan obligasi daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

- a. Strategi 1 “Meningkatkan komitmen kepala daerah dalam penerbitan obligasi daerah dengan cara audiensi dan peningkatan kapasitas kepala daerah serta sosialisasi dan edukasi kepada kepala daerah, DPRD, dan masyarakat melalui penyelenggaraan audiensi dengan kepala daerah

terkait manfaat obligasi daerah, sosialisasi dan edukasi terkait manfaat obligasi daerah, dan kolaborasi dengan media melalui pemberitaan media dan penulisan riset”.

Dalam mengatasi hambatan komitmen pemerintah berupa komitmen kepala daerah, strategi yang diusulkan adalah meningkatkan komitmen kepala daerah dalam penerbitan obligasi daerah sebagai *end* (tujuan). Adapun *ways* (cara) yang bisa dilakukan dengan melakukan audiensi dan peningkatan kapasitas kepala daerah, sosialisasi dan edukasi kepada kepala daerah, DPRD, dan masyarakat. Selanjutnya *means* (sarana) yang diperlukan antara lain (i) audiensi dengan kepala daerah terkait manfaat obligasi daerah, (ii) sosialisasi dan edukasi terkait manfaat obligasi daerah, dan (iii) kolaborasi dengan media melalui pemberitaan media dan penulisan riset cara.

- b. Strategi 2 “Menentukan proyek yang efisien, akuntabel, dan kolaboratif dengan cara penyusunan metodologi dan mitigasi risiko serta kolaborasi dalam penentuan proyek melalui penyusunan metodologi penilaian proyek potensial dari pemilihan pembiayaan dan pemenuhan syarat, penyusunan mitigasi risiko, kolaborasi dengan perangkat daerah teknis pemilik proyek, dan kolaborasi dengan lembaga donor dalam peningkatan kapasitas”.

Guna mengatasi hambatan persyaratan penerbitan berupa penentuan proyek, strategi yang diusulkan adalah penentuan proyek secara efisien, akuntabel, dan kolaboratif sebagai *end* (tujuan). Adapun *ways* (cara) yang dapat dilakukan adalah melakukan penyusunan metodologi dan mitigasi risiko penentuan proyek dan kolaborasi dalam penentuan proyek. Selanjutnya *means* (sarana) yang diperlukan antara lain (i) penyusunan metodologi penilaian proyek potensial dari pemilihan pembiayaan dan pemenuhan syarat, (ii) penyusunan mitigasi risiko dalam penentuan proyek, (iii) kolaborasi dengan perangkat daerah teknis pemilik proyek dalam perencanaan proyek, serta (iv) kolaborasi dengan lembaga donor dalam peningkatan kapasitas perencanaan proyek.

- c. Strategi 3: “Membentuk DMU yang profesional dengan cara penyiapan struktur organisasi, perangkat kerja, dan SDM DMU melalui penyusunan regulasi sebagai dasar hukum pembentukan unit, penyusunan SOP dan uraian jabatan, perekrutan profesional/pegawai yang berkompeten, serta penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan”. Secara lengkap keempat strategi yang diusulkan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Dalam mengatasi hambatan persyaratan penerbitan berupa kesiapan DMU, strategi yang diusulkan adalah membentuk DMU yang profesional sebagai *end* (tujuan). Adapun *ways* (cara) yang pertama bisa dilakukan dengan penyiapan struktur organisasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia DMU. Selanjutnya *means* (sarana) yang diperlukan adalah (i) penyusunan regulasi sebagai dasar hukum pembentukan unit, (ii) penyusunan kelembagaan DMU melalui SOP dan uraian jabatan, (iii) perekrutan profesional/pegawai yang berkompeten, serta (iv) penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan.

- d. Strategi 4 “Mendorong penetapan regulasi pusat terkait obligasi daerah dengan cara advokasi penyusunan regulasi pusat melalui komunikasi dan koordinasi ke Kementerian Keuangan dan kolaborasi dengan media dan akademisi dalam pemberitaan dan riset”

Hambatan landasan hukum dan prosedur pengelolaan berupa belum ditetapkannya PMK dapat diatasi dengan menggunakan strategi terakhir. Adapun strategi terakhir yang dirumuskan adalah mendorong penetapan regulasi pusat terkait obligasi daerah sebagai *end* (tujuan). Selanjutnya *ways* (cara) yang dapat dilakukan adalah advokasi penyusunan regulasi pusat. Adapun *means* (sarana) yang diperlukan dalam menerapkan cara dimaksud adalah komunikasi dan koordinasi ke Kementerian Keuangan dan kolaborasi dengan media dan akademisi dalam pemberitaan dan riset.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran diantaranya:

1. Agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan selaku inisiator penerbitan obligasi daerah:
 - a. Melakukan audiensi, rapat konsultasi, maupun melibatkan DPRD dalam kegiatan seminar/workshop/FGD dengan tema obligasi daerah sehingga dapat meningkatkan literasi DPRD yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan DPRD untuk selanjutnya dapat mendorong kepala daerah dalam atas rencana penerbitan obligasi daerah;
 - b. Menyusun konsep Keputusan Gubernur terkait penetapan proyek yang akan dibiayai melalui obligasi daerah sehingga dapat meningkatkan komitmen seluruh perangkat daerah untuk segera memenuhi *readiness criteria*;
 - c. Melakukan audiensi atau konsultasi ke Kementerian Keuangan guna mengetahui lebih awal konsep pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun sehingga dapat menyiapkan berkas/dokumen yang diperlukan dalam proses penerbitan obligasi; serta
2. Agar Biro BIA bersama Bappeda dan BPKAD, dapat:
 - a. Merincikan kembali rumusan strategi dengan menambahkan langkah-langkah yang akan dijalankan, menetapkan *goals* dari setiap langkah, serta menentukan *timeline* (jadwal) pelaksanaannya;
 - b. Menyediakan anggaran yang cukup namun tetap mengikuti prinsip efisien, efektif, dan ekonomi (*value for money*) untuk melaksanakan langkah-langkah dari strategi yang akan dijalankan; dan
 - c. Bersama dengan perangkat daerah terkait misalnya Biro Organisasi dan BPKAD untuk mempertimbangkan peluang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada BPKAD sebagai DMU yang telah mencakup keseluruhan tugas yaitu *front office*, *middle office*, dan *back office*.
 - d. Menjalin komunikasi dengan kementerian pusat, lembaga donor, kampus, maupun asosiasi profesi guna mencari peluang untuk kerja sama

penyelenggaraan atau mendapatkan hibah/bantuan dalam pelatihan/peningkatan kapasitas SDM DMU.

3. Tesis ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penulisannya, diantaranya metode penelitian yang digunakan, jumlah informan yang dilakukan wawancara, serta metode penyusunan strategi yang sederhana. Kiranya penelitian ke depan terkait obligasi daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dapat mengembangkan hasil tesis ini melalui penggunaan metode penelitian campuran (*mixed-method*), menambah jumlah informan terutama kepala daerah selaku pemilik visi dan misi daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola kebijakan pendapatan daerah, perangkat daerah *project owner* selaku pemilik proyek yang akan dibiayai dari obligasi daerah, masyarakat sebagai calon investor sekaligus penerima manfaat pembangunan proyek yang akan dibiayai dari obligasi daerah, serta akademisi untuk menambahkan perspektif dalam penulisan. Terakhir, penelitian ke depan juga diharapkan dapat menggunakan metode yang lebih kompleks dalam penentuan strategi misalnya menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau *Analytic Network Process* (ANP).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu.
- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Alfabeta.
- Aini, N., Taymi, T., & Hana, K. F. (2020). Obligasi Daerah yang Tak Kunjung Terbit sebagai Salah Satu Faktor Perkembangan Daerah. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 71–90.
- Alinaowska, D. (2011). Municipal Bonds as A Tool of Financing The Local Government's Investment in Rural Areas in Poland. *Oeconomia*, 10(2), 29–39.
- Amnan, A. (2016). *Analisis Penerbitan Obligasi Daerah (Studi Kasus Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Gadjah Mada.
- Anggara, S. (2012a). Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Meningkatkan Good Governance. In B. A. Saebani (Ed.), *Cv Pustaka Setia*. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2012b). *Perbandingan Administrasi Negara* (B. A. Saebani (Ed.)). Pustaka Setia.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik* (B. A. Saebani (Ed.)). CV Pustaka Setia.
- Anisah, T. S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat*. Universitas Indonesia.
- Antaranews.com. (2023a). *Masa Jabatan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Berakhir Pada 5 September 2023*. <https://www.antaranews.com/berita/3661185/masa-jabatan-ridwan-kamil-uu-ruzhanul-berakhir-pada-5-september-2023>
- Antaranews.com. (2023b). *Pj Gubernur Jabar Kaji Ulang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah*. <https://www.antaranews.com/berita/3880005/pj-gubernur-jabar-kaji-ulang-rencana-penerbitan-obligasi-daerah>
- Biro BIA. (2021). *Workshop Inisiasi Penerbitan Obligasi Sukuk Daerah*. https://www.youtube.com/watch?v=r5hwHF_wqa4&t=9944s
- Biro BIA. (2023). *Update Potensial Project Obligasi Daerah (8 Desember 2023)*.
- Biro BIA. (2024a). *FGD Pembiayaan Kreatif Obligasi Daerah (30 Mei 2024)*.
- Biro BIA. (2024b). *Profil Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat*. <https://birobia.jabarprov.go.id/profile/bureau>
- Biro BIA. (2024c). *Update Progress Rencana Inisiasi Penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah Provinsi Jawa Barat (14 Mei 2024)*.

- Bisnis.com. (2023). *Wagub Jabar Sebut Penerbitan Obligasi Daerah Masih Perlu Sosialisasi*. <https://market.bisnis.com/read/20230803/92/1681155/wagub-jabar-sebut-penerbitan-obligasi-daerah-masih-perlu-sosialisasi>
- Chalamsa, M. (2017). *Institusionalisasi Penerbitan Obligasi Daerah Pada Penyediaan Pendanaan Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus: Pembangunan Bandara Internasional Jawa* repository.ub.ac.id. <http://repository.ub.ac.id/1463/>
- Chandra, A. P. (2011). *Aspek Hukum Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia: Studi Kasus Penerbitan Obligasi Khusus Ibukota Jakarta*. Universitas Indonesia.
- Chen Y, L. F. and W. H. (2013). Study on Urban Infrastructure Bottlenecks. In E. Qi, J. Shen, & R. Dou (Ed.), *Proceedings of the International Conference on Information Engineering and Applications (IEA) 2012* (hal. 119–125). Springer-Verlag.
- CNN Indonesia. (2023). *Incar Dana Rp2 T, Jabar Jadi Daerah Contoh Terbitkan Obligasi Daerah*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230703185057-532-968995/incar-dana-rp2-t-jabar-jadi-daerah-contoh-terbitkan-obligasi-daerah>
- Daroedono. (2004). *Pengembangan Lembaga Keuangan dan Investasi Infrastruktur. Info Kajian Bappenas*.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (R. Sikumbang (Ed.)). Ghalia Indonesia.
- Domai, T. (2011). *Desentralisasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Graha Ilmu.
- Eltrudis, D. (2022). On the Financial Autonomy of European Local Governments: The Case of Municipal Bonds in Italy. *European Research Studies Journal*, XXV(Issue 1), 226–242. <https://doi.org/10.35808/ersj/2839>
- Glasser, M. (2020). Municipal Bonds in Three Countries: India, South Africa and the United States United States. *Journal of Comparative Urban Law and Policy*, 4(1), 96–132. <https://readingroom.law.gsu.edu/jculpAvailableat:https://readingroom.law.gsu.edu/jculp/vol4/iss1/15>
- Harwood, A. (2000). *Building Local Bond Markets: An Asian perspective* (A. Harwood (Ed.)). International Finance Corporation. <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US2012420022>
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penelitian Data Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Hestian, E. (2020). *Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk*

- Pembangunan Infrastruktur Melalui Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*. Universitas Gadjah Mada.
- Jabarnews.com. (2023a). *Bangun Infrastruktur Kesehatan, DPRD Jabar Dukung Langkah Ridwan Kamil Terbitkan Obligasi Daerah*. <https://www.jabarnews.com/dprd-jabar/bangun-infrastruktur-kesehatan-dprd-jabar-dukung-langkah-ridwan-kamil-terbitkan-obligasi-daerah/>
- Jabarnews.com. (2023b). *Ini Alasan DPRD Jabar Tolak Rencana Penerbitan Obligasi Daerah, Gara-gara Utang?* <https://www.jabarnews.com/daerah/ini-alasan-dprd-jabar-tolak-rencana-penerbitan-obligasi-daerah-gara-gara-utang/>
- Jabarprov.go.id. (2024). *Bey Machmudin: Obligasi Daerah Tak Perlu agar Tak Membebani*. <https://jabarprov.go.id/berita/bey-machmudin-obligasi-daerah-tak-perlu-agar-tak-membebani-14048>
- Joffe, M. (2015). *Doubly Bound: The Costs of Issuing Municipal Bonds*.
- Jusron, D. (2022). *Global Infrastructure Hub (GIH) dan Penyediaan Infrastruktur*. Kementerian Keuangan. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1160-1476/umum/kajian-opini-publik/global-infrastruktur-hub-gih-dan-penyediaan-infrastruktur>
- Kalotay, A. (2014). The interest Rate Sensitivity of Tax-exempt Bonds Under Tax-neutral Valuation. *Journal of Investment Management*, 12(1), 62–68.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., Siregar, R. T., Purba, S., Handiman, U. T., Purba, B., Firdaus, Silalahi, M., Ginting, A. M., Simarmata, H. M. P., & Weya, I. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah. In A. Rizki & J. Simarmata (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Nomor 1). Yayasan Kita Menulis. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Strategi Pengelolaan Utang*. Diambil 8 Oktober 2024, dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/strategipengelolaanutang>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, (2012). <https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-180-pmk-07-2015-tahun-2015>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan atas Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, (2015).
- Kementerian Keuangan, UNICEF, & UNDP. (2023). *Studi Lanskap Obligasi Daerah di Indonesia*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, Agustus 9). *Siaran Pers: Pemerintah Terus Implementasikan Berbagai Strategi Menjaga Momentum Perekonomian Nasional yang Baik*. www.ekon.go.id
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Buku Saku Pendanaan Alternatif Mendorong:*

Pemanfaatan Pendanaan Alternatif untuk Meningkatkan Kapasitas Pendanaan Pembangunan di Daerah. Direktorat Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepner, C. H., & Tregoe, B. T. (1981). *The New Rational Manager*. Princeton Research Press.

Khurria, A. (2023). Mengapa Pemerintah Daerah Belum Berhasil Menerbitkan Obligasi Daerah. *Syntax Admiration*, 4(5), 594–608.

Kompas.com. (2024). *Bey Machmudin Tak Akan Lepas Obligasi Daerah, Bisa Bebankan Pemprov Jabar.* Kompas.com. <https://bandung.kompas.com/read/2024/06/21/140425778/bey-machmudin-tak-akan-lepas-obligasi-daerah-bisa-bebankan-pemprov-jabar>

Kozak, S. (2019). The Use Of Municipal Bonds In Financing Regional Economic Development In Poland. *ECREG STUDIES*, 12(3).

LAN. (2015). *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*. Pusat Pembinaan Analis Kebijakan.

Leigland, J. (1997). Accelerating Municipal Bond Market Development in Emerging Economies: An Assessment of Strategies and Progress. *Public Budgeting and Finance*, 17(2), 57–79. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.01100>

Lykke Jr, A. (1989). Defining Military Strategy = E + W + M. *Military Review*, LXIX(5), 3–8.

Medda, F. R., & Cocconcelli, L. (2018). Management, Procurement and Law. *Management, Procurement and Law*, 171(5), 220–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.1680/jmapl.17.00018>

Ministry of Finance Government of India. (2017). *Guidance on use of Municipal Bond Financing for Infrastructure projects PPP* (Nomor September). Ministry of Finance Government of India. www.pppinindia.gov.in

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke). Remaja Rosdakarya.

Moody's. (2017). *US Municipal Bond Defaults and Recoveries, 1970-2014*. <https://www.atlasca.com/wp-content/uploads/2019/02/Moodys-default-study-1970-2017.pdf>

Nurman. (2017). *Strategi Pembangunan Daerah* (1 ed.). Rajawali Pers.

O'Hara, N. (2012). *The Fundamentals of Municipal Bonds / SIFMA* (Sixth Edit, Vol. 06, Nomor 06). John Wiley & Sons, Inc.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Utang, dan Atau Sukuk secara Elektronik, (2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan

- Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 14/OJK (2024).
- Pasolong, H. (2016). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- PEFINDO. (2024). *Rating Definition*.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, (2015).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, (2022).
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, (2022).
- Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Pub. L. No. Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25 (2023).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, (2024).
- Politeknik STIA LAN Jakarta. (2021). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Prasetya, B. P., & Setiawan, A. (2021). Peran Jaminan Obligasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Peringkat Obligasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sektor Perbankan di Indonesia. *EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 8(3), 130–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v8i1.180>
- Prasetyo, R. B., & Firdaus, D. M. (2009). Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222–236.
- Purnomo, B. S. (2009). *Obligasi Daerah Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. (2020). *Analisis*

- Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia pada Tahun 2023 di Sektor Perdagangan*. Kementerian Perdagangan.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (W. Putra (Ed.)). Rajagrafindo Perkasa.
- Rahayu, I. T., & Ardani, T. A. (2004). *Observasi dan Wawancara*. Bayumedia Publishing.
- Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridho, M. R. (2023). Obligasi Daerah Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Asas Keterbukaan. In *Setara Press*. Setara Press.
- Shamseen, R. (2022). *The Application of Municipal Bonds to fund Local authorities projects in England; Barriers and Solutions* [The University of Sheffield]. <https://etheses.whiterose.ac.uk/31466/>
- Sharma, M., Lee, J., & Streeter, W. (2023). *Mobilizing Resources through Municipal Bonds: Experiences from Developed and Developing Countries* (Nomor 88). <https://doi.org/10.22617/WPS230273-2>
- Sofi, I., & Pusat, A. K. (2020). Analisis Kelayakan Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/984>
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen Strategi*. Pena Persada.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suradinata, E. (2016). *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*. Alqaprint Jatinangor.
- Susanti, B. (2021). *Pengantar Advokasi Kebijakan*. Transparency International Indonesia. <https://transparansi.id/wp-content/uploads/2021/10/TII-Pengantar-Advokasi-19.08.2021.pdf>
- Suwardini, N. (2023). Telaahan tentang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah di Jawa Barat. *Bappenas Working Papers*, 6(2), 169–181. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.216>
- Tang, W. (2021). *Research on the Problems and Countermeasures of Local Government Bonds Issuance*. 3(3), 54–58. <https://doi.org/10.25236/AJBM.2021.030310>
- Tempo.co. (2020). <https://bisnis.tempo.co/read/1301642/ridwan-kamil-sebut-penerbitan-obligasi-jawa-barat-hampir-final>.

- <https://bisnis.tempo.co/read/1301642/ridwan-kamil-sebut-penerbitan-obligasi-jawa-barat-hampir-final>
- Tempo. (2024a). *Cara Jawa Barat Memanfaatkan Obligasi Daerah*. <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/171275/obligasi-daerah-jawa-barat%0A>
- Tempo. (2024b). *Maju-Mundur Aturan Penerbitan Obligasi Daerah*. <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/171298/aturan-obligasi-daerah%0A>
- Tempo. (2024c). *Risiko di Balik Penerbitan Obligasi Daerah*. Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/opini/171287/risiko-obligasi-daerah?>
- Tjokroamidjojo, B. (1974). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Türkgenç, Y. (2023). Thoughts on Strategy Formulation. *Güvenlik Stratejileri Dergisi*, 19(45), 513–528. <https://doi.org/10.17752/guvenlikstrjtj.1347296>
- Vitkovic, C. F., & Kopanyi, M. (Ed.). (2014). *Municipal Finances A Handbook or Local Government*. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Waruwu, P. W. A., Napitupulu, V. D. A., Bara, P. R. C., Hasugian, L. A., & Lubis, P. K. D. (2024). Penyebab Kegagalan Penerbitan Obligasi Daerah (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jawa Barat). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1567–1578.
- Weil, H. E. (1907). Municipal Bond Issues Explained Author. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 30, 197–203. <https://www.jstor.org/stable/1010887>
- World Bank. (1994). *World Development Report 1994: Infrastructure for Development* (First). Oxford University Press. Inc.
- World Bank. (2018). *Public Private Infrastructure Advisory Facility Indonesia : Strengthening Subnational Fiscal Capacity for Infrastructure Financing* (Nomor December).
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Revisi). Rajawali Pers.
- Yarger, H. R. (2008). *Toward a Theory of Strategy: Art Lykke and The US Army War College Strategy Model*. <http://www.jstor.com/stable/resrep12115.6>
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris* (A. E. Yustika (Ed.)). Bayumedia Publishing.